



ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA LAPORAN REALISASI ANGGARAN DI PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG

Yolanda Bulo

Jurusan Akuntansi, Universitas Mulawarman, Jalan Tanah Grogot No. 1, Samarinda,
Kalimantan Timur 75119, Indonesia.

*Korespondensi Penulis, E-mail: yolandatabithabulo@gmail.com Telp : 082154516500

ABSTRAK

Perumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2014-2017 bila dianalisis menggunakan beberapa rasio keuangan. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2014-2017 berdasarkan 7 (tujuh) rasio yaitu; rasio kemandirian, rasio ketergantungan, rasio derajat desentralisasi, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio indeks kemampuan rutin dan rasio keserasian. Penelitian ini bersifat Deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis rasio keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kota Bontang memiliki rata-rata rendah sekali berdasarkan skala pada kriteria yg digunakan untuk penelitian ini, tingkat ketergantungan keuangan daerah masih sangat tinggi berdasarkan skala pada kriteria yang digunakan pada penelitian ini, tingkat derajat desentralisasi masih kurang berdasarkan skala pada kriteria yang digunakan pada penelitian ini, tingkat efektifitas berstatus sangat efektif dan tingkat efisiensi berstatus kurang efisien berdasarkan skala pada kriteria yang digunakan pada penelitian ini, rasio indeks kemampuan rutin berskala masih sangat kurang berdasarkan kriteria yang digunakan pada penelitian ini, rasio keserasian menunjukkan bahwa rasio belanja rutin lebih diprioritaskan dibandingkan dengan rasio belanja pembangunan.

Kata Kunci: rasio keuangan, rasio kemandirian, rasio ketergantungan, rasio derajat desentralisasi, rasio efektifitas dan efisiensi, dan rasio keserasian.

ABSTRACT

The formulation of the problem of this research is: How is the Financial Performance of Bontang City Regional Government 2014-2017 Fiscal Year if the analysis uses several financial ratios. And the purpose of this research is to find out the financial performance of the Regional Government of Bontang City for 2014-2017 Budget Year based on 7 (seven) ratios, namely; independence ratio, dependency ratio, decentralized degree ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio, routine ability index ratio and harmony ratio. This research is descriptive. The data collection method used in this study is the documentation method. The data analysis technique used is financial ratio analysis.

Based on the results of the study show that: the level of financial independence of the Regional Government of the City of Bontang has a very low average based on the scale of the criteria used for this study, the level of regional financial dependence is still very high based on the criteria used in this study, the degree of decentralization is still less based on the scale of the criteria used in this study, the level of effectiveness is very effective and the level of efficiency is less efficient based on the scale used in this study, the routine scale ability index ratio is still



very poor based on the criteria used in this study, harmony ratio shows that the ratio of routine expenditure is prioritized compared to the ratio of development spending.

Keywords: financial ratio, independence ratio, dependency ratio, decentralized degree ratio, effectiveness and efficiency ratio, and harmony ratio.

PENDAHULUAN

Fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintahan daerah di Indonesia di bidang keuangan adalah relatif kecilnya peranan (kontribusi) Pendapatan Asli Daerah di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan kata lain peranan/kontribusi penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk sumbangan dan bantuan, bagi hasil pajak dan bukan pajak, mendominasi susunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan didalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PP No.24 Tahun 2005). Sedangkan menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 dalam Warsito Kawedar, dkk (2008), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Fenomena keuangan Pemerintah Daerah Kota Bontang adalah berhasilnya memperoleh penghargaan dari Pemerintah RI dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2016 dengan pencapaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Kepala kanwil DJPb Kaltim, juga mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota Bontang yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan Tahun 2016 dengan baik dan sesuai aturan, selain penghargaan yang diterima Pemerintah Kota Bontang juga berhak mendapatkan imbalan berupa insentif dengan nominal anggaran sebesar Rp 24 miliar.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka daerah diberikan otonomi atau kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri.

Adanya desentralisasi keuangan merupakan konsekuensi dari adanya kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran disektor publik maka mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain dari pendapatan yang sah (Halim, 2009).

Untuk menganalisa kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dapat menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan dari tahun ke tahun.

Dalam penelitian ini penulis memilih Kota Bontang untuk dapat diteliti kemandirian daerahnya serta kinerjanya juga karena Pemerintah Kota Bontang yang pernah menerima penghargaan sebagai standar tertinggi akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah dalam



penyusunan dan penyajian laporan keuangan pada Tahun 2016 yang mendorong penulis untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Bontang. Penelitian dilakukan dan didapat Laporan Realisasi Anggaran dari tahun 2014-2017, Kota Bontang dituntut untuk lebih meningkatkan kemandirian daerah dengan cara mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat dan diharapkan dapat meningkatkan kemandirian daerahnya. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat hubungannya dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Suatu daerah otonom diharapkan mampu atau mandiri di dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dari ketergantungan kepada pemerintah pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sesuai dengan tugas pemerintah yaitu melaksanakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam arti pemerintahan yang bersih (jujur), terbuka (transparan) dan bertanggungjawab (akuntabel) terhadap masyarakat. Pemerintah daerah di Kota Bontang harus memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang berupa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada tahun tertentu.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka perlu diadakan penelitian dengan menganalisis APBD menggunakan rasio keuangan Pemerintah Kota Bontang dengan judul : **“ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA LAPORAN REALISASI ANGGARAN DI PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG”**.

METODE PENELITIAN

Definisi Operasional

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dipahami ada berbagai unsur-unsur yang menjadi dasar suatu penelitian ilmiah yang termuat dalam definisi operasional dan pengukuran variabel ini. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota yang mencakup beberapa parameter berupa rasio, yaitu:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, semakin tinggi rasio ini maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah.

Rumusnya sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ini menunjukkan tentang seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap transfer baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Pada umumnya, kontribusi terbesar pendapatan transfer terdapat pada dana perimbangan seperti dana alokasi umum, yaitu dana yang digunakan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah. Rasio ini adalah perbandingan antara total realisasi pendapatan transfer dengan total realisasi pendapatan daerah.

Rumusnya sebagai berikut :

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

3. Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio ini menggambarkan besarnya campur tangan pemerintah pusat dalam membangun daerah yang menunjukkan tingkat kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.



Rumusnya sebagai berikut :

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

4. Rasio Efektifitas

Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Rumusnya sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Berdasarkan Potensi Riil Daerah

5. Rasio Efisiensi

Rasio ini menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Rumusnya sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

6. Rasio Indeks Kemampuan Rutin

Rasio ini dapat dilihat melalui proporsi antara Pendapatan Asli Daerah dengan pengeluaran rutin tanpa transfer dari Pemerintah Pusat.

Rumusnya sebagai berikut :

$$\text{Rasio Indeks Kemampuan Rutin} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah PAD}}{\text{Total Pengeluaran Rutin}} \times 100\%$$

7. Rasio Keserasian

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja aparatur daerah dan belanja Total Realisasi Belanja Daerah Total Realisasi Pendapatan Daerah pelayanan publik secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja aparatur daerah berarti persentase belanja investasi (belanja pelayanan publik) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja aparatur daerah maupun belanja pelayanan publik terhadap belanja daerah yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan.

Rumusnya sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Rutin} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

Selain rasio keuangan adapun definisi operasional yang lain yaitu:

1. Analisis kinerja keuangan daerah merupakan salah satu alat yang kami gunakan untuk memulai dan menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Cara pengukurannya digunakan dengan pengumpulan data/ laporan keuangan dari Pemerintah Daerah Kota Bontang apakah sudah baik atau buruk selama periode tersebut.
2. Laporan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan laporan yang menyajikan perbandingan antara anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan realisasinya dalam satu periode akuntansi.
3. Indeks Kemampuan Rutin (IKR) adalah Suatu ukuran yang menggambarkan sejauh mana kemampuan keuangan dalam potensi suatu daerah dalam membiayai belanja rutin, dinyatakan dalam persen.
4. Total penerimaan daerah (TPD) adalah seluruh penerimaan suatu daerah dalam periode tahun



anggaran tertentu yang menjadi hak daerah, baik itu berasal dari PAD, dana perimbangan dan pendapatan lain yang sah.

5. Total Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah, baik untuk belanja rutin maupun untuk belanja pembangunan.

Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Gambaran umum Pemerintah Daerah Kota Bontang.
2. Data-data untuk perhitungan analisis rasio yang berasal dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bontang yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2014-2017.
3. Data yang dapat mendukung penelitian seperti literature, buku referensi, jurnal, majalah, dan surat kabar yang berkaitan dengan penelitian.

Alat Analisis

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Menghitung Rasio kemandirian keuangan daerah berdasarkan APBD

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Realisasi Bantuan Pemerintah Pusat, Provisidan Pinjaman}} \times 100\%$$

Sebagai pedoman dalam melihat kemampuan keuangan daerah dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 1. Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)
Sangat Rendah	0 - 25
Rendah	> 25 - 50
Sedang	> 50 - 75
Tinggi	> 75 - 100

Sumber: Halim, 2004

2. Menghitung Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah terhadap APBD

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Pendapatan Transfer}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria untuk menetapkan ketergantungan keuangan daerah dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah ini:



Tabel 2. Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Persentase Pendapatan Transfer terhadap Total Pendapatan Daerah (%)	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat Rendah
10,01 -20,00	Rendah
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Tinggi
> 50,00	Sangat Tinggi

Sumber: Bisma, 2010

3. Menghitung Derajat Desentralisasi terhadap APBD

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Total pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria untuk menetapkan Derajat Desentralisasi dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3. Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Presentase PAD terhadap TPD (%)	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber: Bisma, 2010

4. Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD terhadap APBD

➤ Rasio Efektifitas

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD Berdasarkan Potensi Riil Daerah}} \times 100\%$$



Tabel 4. Kriteria Kinerja Keuangan Rasio Efektifitas

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup Efektif
75%-89%	Kurang Efektif
Kurang dari 75%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi, 2011

➤ Rasio Efisiensi

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 5. Kriteria Kinerja Keuangan Rasio Efisiensi

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100%-ke atas	Tidak Efisien
90-100%	Kurang Efisien
80-90%	Cukup Efisien
60-80%	Efisien
Dibawah 60%	Sangat Efisien

Sumber : Halim, 2013

5. Rasio Indeks Kemampuan Rutin terhadap APBD

$$\text{Rasio Indeks Kemampuan Rutin} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}{\text{Total Realisasi Pengeluaran Rutin}} \times 100\%$$

Sedangkan dalam menilai indeks kemampuan rutin dengan menggunakan skala menurut Wulandari (2001:15).

Tabel 6. Skala Indeks Kemampuan Rutin Keuangan Daerah

Persentase Keuangan Daerah %	Kemampuan Keuangan Daerah
00,00-20,00	Sangat Kurang
20,01-40,00	Kurang
40,1-60,00	Cukup
60,00-80,00	Baik
80,00-100,00	Sangat Baik

Sumber: Wulandari, 2001

6. Menghitung Rasio Kesenjangan terhadap APBD

Rasio Kesenjangan dapat diformulasikan menjadi dua yaitu :

➤ Rasio Belanja Rutin terhadap APBD

$$\text{Rasio Belanja Rutin terhadap APBD} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Rutin}}{\text{Total Realisasi APBD}} \times 100$$



- Rasio Belanja Pembangunan Terhadap APBD

$$\text{Rasio Belanja Pembangunan} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Rutin}}{\text{Total Realisasi APBD}} \times 100\%$$

Tabel 7. Keserasian Belanja Keuangan Daerah

Keserasian Belanja Daerah Otonom Kemampuan Keuangan	Rasio Keserasian Belanja (%)
Tidak Serasi	0-20
Kurang Serasi	>20-40
Cukup Serasi	>40-60
Serasi	>60-80
Sangat Serasi	>80-100

Sumber : Mahsun, 2006

PEMBAHASAN

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kota Bontang Tahun 2014-2017

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Bantuan (Rp)	Rasio Kemandirian	Kemandirian Keuangan
2014	160.367.872.157,65	1.028.580.014.543,00	15,59%	Sangat Rendah
2015	137.850.997.232,80	1.178.698.695.378,00	11,70%	Sangat Rendah
2016	170.123.811.101,19	910.458.458.699,00	18,69%	Sangat Rendah
2017	169.077.548.653,40	717.385.768.954,00	23,57%	Sangat Rendah

Sumber : Data diolah

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kota Bontang Tahun 2014-2017 belum stabil. Untuk tahun 2014 sebesar 15,59%, untuk tahun 2015 sebesar 11,70%, untuk tahun 2016 sebesar 18,69%, untuk tahun 2017 sebesar 23,57%.

Sehingga Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bontang dari tahun 2014-2017 memiliki rata-rata tingkat kemandirian yang sangat rendah ini berarti peranan pemerintah pusat sangat dominan.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kota Bontang Tahun 2014-2017

Tahun	Realisasi Pendapatan Transfer (Rp)	Total Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	RKKD	Ketergantungan Keuangan
2014	1.028.580.014.543,00	1.455.043.424.236,08	70,69%	Sangat Tinggi
2015	1.178.698.695.378,00	1.347.525.520.598,46	87,47%	Sangat Tinggi



2016	910.458.458.699,00	1.203.633.625.194,19	75,64%	Sangat Tinggi
2017	717.385.768.954,00	1.060.400.315.664,76	67,65%	Sangat Tinggi

Sumber : Data diolah

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kota Bontang adalah sebagai berikut : 70,69% untuk tahun 2014, 87,47% untuk tahun 2015, 75,64% untuk tahun 2016 dan 67,65% dan untuk tahun 2017. Karena tingkat Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kota Bontang selalu berada di atas 50% dan berdasarkan kriteria menurut Bisma (2010:77) skala keuangan daerah >50% adalah sangat tinggi.

Rasio Derajat Desentralisasi Pemerintah Daerah Kota Bontang Tahun 2014-2017

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Total Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Derajat Desentralisasi	Kemampuan Derajat Desentralisasi
2014	160.367.872.157,65	1.455.043.424.236,08	11,02%	Kurang
2015	137.850.997.232,80	1.347.525.520.598,46	10,23%	Kurang
2016	170.123.811.101,19	1.203.633.625.194,19	14,13%	Kurang
2017	169.077.548.653,40	1.060.400.315.664,76	15,94%	Kurang

Sumber : Data diolah

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa rasio Derajat Desentralisasi Pemerintah Daerah Kota Bontang pada tahun 2014 adalah sebesar 11.02% sedangkan pada tahun 2015 adalah sebesar 10,23% dan pada tahun 2016 adalah sebesar 14,13% dan pada tahun 2017 yaitu sebesar 15,94%. Jika dilihat dari skala interval kemampuan keuangan daerah menurut Bisma (2010:78) dapat dikatakan masih kurang. Ini berarti kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Provinsi untuk menggali dan mengelola sumber daya yang dimiliki oleh Daerah Kota Bontang masih kurang dalam upaya menyelenggarakan desentralisasi. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya PAD terhadap Total Pendapatan Daerah.

Rasio Efektifitas Pemerintah Daerah Kota Bontang Tahun 2014-2017

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Target PAD (Rp)	Rasio Efektifitas	Kemampuan Efektifitas Keuangan
2014	160.367.872.157,65	144.210.905.439,24	111,20%	Sangat Efektif
2015	137.850.997.232,80	133.406.475.244,47	103,33%	Sangat Efektif
2016	170.123.811.101,19	152.109.768.961,33	111,84%	Sangat Efektif
2017	169.077.548.653,40	160.339.852.119,92	105,45%	Sangat Efektif



Sumber : Data diolah

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa Rasio efektifitas PAD tahun anggaran 2014-2017 untuk Pemerintah Daerah Kota Bontang adalah sebagai berikut yaitu untuk tahun 2014 adalah sebesar 111,20%, untuk tahun 2015 yaitu sebesar 103,33%, untuk tahun 2016 adalah sebesar 111,84%, pada tahun 2017 adalah sebesar 105,45%, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah sangat bekerja luarbiasa yang mana realisasi lebih besar dari pada target yang telah ditentukan. Pemerintah Daerah Kota Bontang termasuk dalam kategori sangat efektif dalam merealisasikan PAD yang telah ditargetkan dan berada dalam skala lebih dari 100% yang menurut skala perhitungan dalam buku Mahmudi (2011:171) menunjukkan bahwa kinerja keuangan sangat efektif.

**Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah Kota Bontang
Tahun 2014-2017**

Tahun	Total Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Total Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Efisiensi	Kemampuan Efisiensi Keuangan
2014	1.388.006.250.627,31	1.455.043.424.236,08	95,39%	Kurang Efisien
2015	1.663.289.633.614,00	1.347.525.520.598,46	123,43%	Tidak Efisien
2016	1.155.009.964.123,00	1.203.633.625.194,19	95,96%	Kurang Efisien
2017	1.060.400.315.664,76	945.168.192.323,00	112,19%	Tidak Efisien

Sumber : Data diolah

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah Kota Bontang Tahun 2014-2017 masih tidak efisien karena masih rata-rata diatas 100%. Pada tahun 2014 rasio efiseinsinya adalah sebesar 95,39% yang berarti masih kurang efisien sedangkan pada tahun 2015 rasionya sebesar 123,43% yang sama sekali tidak efisien, sedangkan pada tahun 2016 rasionya sebesar 95,96% yang masih kurang efisien, dan pada tahun 2017 rasionya sebesar 112,19% yang berarti sama sekali tidak efisien.

**Rasio Indeks Kemampuan Rutin Pemerintah Daerah
Kota Bontang Tahun 2014-2017**

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Total Realisasi Pengeluaran Rutin (Rp)	Rasio Kemampuan	Indeks Kemampuan Rutin
2014	160.367.872.157,65	901.506.723.512,31	17,79%	Sangat Kurang
2015	137.850.997.232,80	1.013.022.583.865,00	13,61%	Sangat Kurang
2016	170.123.811.101,19	806.984.838.210,00	21,08%	Kurang
2017	169.077.548.653,40	714.137.024.090,00	23,68%	Kurang

Sumber : Data diolah

Berdasarkan Tabel 4.12 dapat diketahui bahwa rasio kemampuan rutin Pemerintah Daerah Kota Bontang Tahun 2014-2017 secara keseluruhan masih kurang. Hal ini menggambarkan bahwa total pengeluaran rutin lebih besar dari pada realisasi PAD.



Hal ini menunjukkan bahwa PAD mempunyai kemampuan yang masih sangat kurang dalam membiayai pengeluaran rutin dari tahun 2014-2017 untuk Pemerintah Daerah Kota Bontang. Maka dari itu Pemerintah Kota Bontang perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan meminimalisir pengeluaran rutinnya.

Rasio Keserasian Belanja Rutin Pemerintah Daerah Kota Bontang
Tahun 2014-2017

Tahun	Total Realisasi Belanja Rutin (Rp)	Total Realisasi APBD (Rp)	Rasio Belanja Rutin	Kemampuan Keserasian Keuangan
2014	936.003.206.043,31	1.388.006.250.627,31	67,44%	Serasi
2015	1.069.708.949.885,00	1.663.289.633.614,00	64,31%	Serasi
2016	886.073.222.723,00	1.155.009.964.123,00	76,72%	Serasi
2017	714.033.656.799,00	945.168.192.323,00	75,55%	Serasi

Sumber : Data diolah

Berdasarkan Tabel 4.14 di atas dapat diketahui bahwa rasio belanja rutin Pemerintah Daerah Kota Bontang untuk tahun 2014 adalah sebesar 67,44%, untuk tahun 2015 adalah sebesar 64,31%, untuk tahun 2016 adalah sebesar 76,72% dan untuk tahun 2017 adalah sebesar 75,55%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat rasio belanja rutin terhadap APBD adalah termasuk dalam kriteria serasi yang berarti bahwa Pemerintah Daerah Kota Bontang sudah bekerja sangat baik dalam usaha belanja rutin.

Rasio Keserasian Belanja Pembangunan Pemerintah Daerah Kota Bontang
Tahun 2014-2017

Tahun	Total Realisasi Belanja Pembangunan (Rp)	Total Realisasi APBD (Rp)	Rasio Belanja Pembangunan	Kemampuan Keserasian Keuangan
2014	452.003.044.584,00	1.388.006.250.627,31	32,56%	Kurang Serasi
2015	591.462.738.529,00	1.663.289.633.614,00	35,56%	Kurang Serasi
2016	247.728.703.313,00	1.155.009.964.123,00	21,45%	Kurang Serasi
2017	221.490.254.924,00	945.168.192.323,00	23,43%	Kurang Serasi

Sumber : Data diolah

Berdasarkan Tabel 4.16 di atas dapat diketahui bahwa rasio belanja pembangunan Pemerintah Daerah Kota Bontang untuk tahun 2014 adalah sebesar 32,56%, untuk tahun 2015 adalah sebesar 35,56%, untuk tahun 2016 adalah sebesar 21,45% dan untuk tahun 2017 adalah sebesar 23,43%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat rasio belanja pembangunan terhadap APBD adalah termasuk dalam kriteria kurang serasi yang berarti bahwa Pemerintah Daerah Kota Bontang harus lebih lagi dalam meningkatkan usaha belanja pembangunannya.



Tingkat Rasio Keserasian Pemerintah Daerah Kota Bontang
Tahun 2014-2017

Tahun	Tingkat Rasio Keserasian		Prioritas
	Belanja Rutin	Belanja Pembangunan	
2014	67,44%	32,56%	Belanja Rutin
2015	64,31%	35,56%	Belanja Rutin
2016	76,72%	21,45%	Belanja Rutin
2017	75,55%	23,43%	Belanja Rutin

Sumber : Data diolah

Berdasarkan Tabel 4.17 diketahui bahwa rasio keserasian Pemerintah Daerah Kota Bontang Tahun 2014-2017 dapat diketahui bahwa tingkat keserasian keuangan daerah untuk tahun 2014 alokasi belanja rutin adalah sebesar 67,44% yang menunjukkan bahwa lebih besar dari pada belanja pembangunan yaitu sebesar 32,56%, untuk tahun 2015 alokasi belanja rutin yaitu sebesar 64,31% yang menunjukkan bahwa lebih besar dari pada alokasi belanja pembangunan yaitu sebesar 35,56%, pada tahun 2016 alokasi belanja rutin adalah sebesar 76,72% yang menunjukkan bahwa lebih besar dari pada alokasi belanja pembangunan yaitu sebesar 21,45%, sedangkan pada tahun 2017 alokasi belanja rutusnya adalah sebesar 75,55% yang juga lebih besar dari pada alokasi belanja pembangunannya yaitu sebesar 23,43%.



DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra, 2010, *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar, Edisi Ketiga*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Bastian, Indra, 2006, *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta.
- Bastian, Indra, 2013. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta.
- Bisma, I Dewa Gede & Susanto, Hery. 2010. *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah*. GaneC Swara Edisi Khusus Vol.4 No.3.
- Halim, Abdul, 2011. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat, Salemba Empat, Jakarta
- Halim, Abdul, 2007. *Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Halim, Abdul, 2009. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul, 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul, 2013. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi ke 5. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, Abdul, 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Mahmudi, 2006, *Manajemen Kinerja sektor Publik*. Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta
- Mahmudi, 2010, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik*, Edisi Kedua, STIM YKPN, Yogyakarta.
- Mahmudi, 2011, *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mahmudi, 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi ketiga, Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad, 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE: Yogyakarta
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2012. *Evaluasi Kinerja SDM cetakan ke enam*. Refika Aditama. Bandung.
- Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta
- Mardiasmo, 2004, *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Kedua, Yogyakarta
- Mardiasmo, 2004, *Analisis Laporan Keuangan Daerah* UPP STM YKPN, Yogyakarta
- Kartikahadi, Hans, dkk. 2016. *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS Buku 1*. Salemba Empat. Jakarta.
- Kawedar, Warsito, Abdul Rohman, dan Sri Handayani. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Buku I. Cetakan I. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.



Kepmendagri, No.29 Tahun 2002 yang selanjutnya diganti dengan Permendagri No.13 tahun 2006

Kieso, Donald E, et al.2016. *Intermediate Accounting*. Asia: John Wiley & Sons Inc.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah

Daerah

_____.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

_____.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

_____.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang “Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat”

_____.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Daerah

_____.Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah

Tanjung, Abdul Hafiz. 2006. *Akuntansi Keuangan Daerah dan Konsep Aplikasi*. Alfabeta. Bandung.

Ulum, Ihyaul, 2009, *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*, Bumi Aksara, Jakarta

Wulandari, Anita, 2001, Kemampuan Keuangan Daerah. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Vol.5 No.2 November*.

Wuryani, Andayani, 2007. *Akuntansi Sektor Publik*, Bayu Media, Jatim.

Yani, Ahmad, 2009. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta. : Rajawali Pers.